PENGARUH DANA BAGIHASIL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL

(Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2011-2015)

Pembimbing :
Helena Risqia, SE., MM

Oleh :
Rika Indriyanti

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

The Revenue Sharing Fund and the Region Own Source Revenue for the year of 2011-2015 Regency and City of West Java Province is descreasing on the Revenue Sharing Fund meanwhile the Region Own Source Revenue is increasing. The Region Own Source revenue is increasing meanwhile the capital expenditure is descreasing. The main objective of the research is to find out the influence of revenue sharing fund on capital expenditure and to know how big region own source revenue on capital expenditure over 6 Region/City that was learned.

The descriptive method and verificative method was employed in this research. The techniques used to analyze the data were double linier regression. The population of the reaserch were receipt realization and government expenditure for 5 year over 6 Regency/town of West Java Province 2011-2015. Saturated sample was employed in this research because it tooks all the member of the population that is 30 receipt realization reports and expenditure from 6 Regency/City of West Java Province in 2011-2015.

Hipotesis result of the research show that the Revenue Sharing Fund have signifficant effect on capital expenditure. Region Own Source have signifficant effect on Capital Ecpenditure.

Keyword : Revenue Sharing Fund, Region Own Source, Capital Expenditure

---

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatakan aset tetap pemerintah daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (V. wiratna Sujarweni, 2015). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas public (Sukriy Abdullah, 2013). Belanja modal merupakan Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan (Warsito Kawedar dkk, 2011:193).

Oktober 2014 Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja modal pemerintah sebesar Rp 71,4 triliun atau 44,4 persen dari pagu anggaran. Sementara pada Oktober 2013, realisasi belanja modal sudah mencapai 45,4 persen dari total pagu. Bambang menjelaskan seharusnya belanja modal bisa digunakan instansi pemerintah untuk melakukan investasi yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dia tidak ingin, upaya Kementerian Keuangan mencari alternatif pendanaan proyek infrastruktur tahun depan melalui utang menjadi tidak produktif jika kementerian lain tidak bisa mengoptimalkan dana yang tersedia (Bambang, 2014).

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pipin Syarifin dkk,2005:108). Dana Bagi Hasil diberikan Pemerintah Pusat untuk mengatasi masalah *vertical fiscal balance* yaitu untuk menjamin keseimbangan antara kebutuhan fiskal dengan sumber-sumber fiskal pada berbagai tingkat pemerintah (Solihin, 2011).

sumber pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 388 miliar tidak dimasukan dalam batang tubuh APBD Kaltim 2017, maka postur anggaran hanya Rp. 7.710.900.000.000. Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim Muspandi mempertanyakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang memilih dana bagi hasil tidak masuk dalam batang tubuh APBD 2017 tidak logis (Muspandi, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2012:101). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Nuarisa, 2013).

Pendapatan daerah pada tahun 2015 hanya mencapai 96% dari target Rp. 3,5 triliun. Januari ini kami akan panggil semua pihak yang berkaitan dengan pendapatan keuangan baik pajak maupun retribusi untuk melakukan evaluasi bersama. dalam pembangunan memerlukan pembiayaan, pembiyaan sendiri bersumber dari pendapatan (Danu Hamidi, 2016).

1.1 Identifikasi Masalah

1. Penyerapan anggaran untuk belanja modal pemerintah masih rendah dan belum mencapai 100 persen.
2. Pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruhi terhadap Belanja Modal pemerintah daerah?
2. Seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruhi terhadap Belanja Modal pemerintah daerah?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Untuk mendapatkan pelajaran lebih banyak dan mendapatkan wawasan yang baru.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan kepada pihak instansi pemerintah dan di harapkan bisa memecahkan masalah mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Mampu memberikan motivasi dan suatu profesi yang berguna bagi lingkungan kampus Universitas Komputer Indonesia serta diharapakn dapat memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat terutama dalam bidang akuntansi.

II. TEORITIS, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Dana Bagi Hasil

Definsi Dana Bagi Hasil (DBH) menurut Abdul Halim (2010:104), adalah :

"Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi."

Definsi Dana Bagi Hasil (DBH) menurut Baldric Siregar (2015:144) adalah :

"Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, dana bagi hasil merupakan pendapatan daerah yang berpotensi apabila dialokasikan untuk anggaran belanja modal".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil yaitu dana yang bersumber dari APBN dan merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah dan merupakan pendapatan daerah yang berpotensi apabila dialokasikan untuk anggaran belanja modal. Adapun Indikator Dana Bagi Hasil Menurut Baldric Siregar (2015:144), yaitu :

a. Bagi Hasil Pajak
   Bagi hasil pajak meliputi bagi hasil PBB pertambangan, PBB perkebunan, PBB perhutanan serta PPH pasal 25 dan PPH pasal 29 wajib pajak orang pribadi dan bagi hasil cukai tembakau.
b. Bagi Hasil Bukan Pajak
   Bagi hasil bukan pajak meliputi bagi hasil dari Iuran Hak Pengusahaan hutan (IHPH), Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), dana reboisasi, iuran tetap, iuran eksplorisasi (Royalti), pungutan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan gas bumi.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Baldric Siregar (2015:31), adalah:

"Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah."

Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut (Halim, 2010:101), adalah :

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah."

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang dihasilkan dari pajak daerah, retrisbusi daerah atau hasil perusahaan dan pendapatan asli daerah yang sah. Adapun Indikator Pendapatan Asli Daerah menurut Baldric Siregar (2015:132) yaitu :

1. Pajak Daerah
   Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :
   a. Pungutan daerah provinsi
      Pajak kendaraan bermotor (PKP). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, dan Pajak rokok.
   b. Pungutan Daerah Kabupaten/Kota
      Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak parkir, dan Pajak air tanah.
2. Retribusi Daerah
   Retribusi kesehatan, Retribusi penggantian, Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, Retribusi parkir, Retribusi pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan Retribusi pemerintah alat pemadam kebakaran.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah
   Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan adalah berbentuk dividen, yaitu bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

2.1.3. Belanja Modal

Definisi Belanja Modal menurut Moh. Mahsun dkk (2013:99), adalah :

> "Belanja untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya".

Definisi Belanja Modal menurut Erlina dan Rasdianto (2013:46), adalah :

> "Pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau asset daerah. Adapun Indikator Belanja Modal menurut Baldric Siregar, (2015:167), yaitu :

a. Belanja Modal Tanah
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
d. Belanja Modal Irigasi, Jalan dan Jaringan
e. Belanja Modal aset tetap Lainnya

2.2. Kerangka Pemikian

2.2.1. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Menurut Baldric Siregar (2015:143), yaitu :

> "Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah. Besaran penerimaan DBH suatu daerah tentunya akan menigkatkan besaran APBD. Untuk meningkatkan penerimaan DBH, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen DBH (DBH Pajak dan DBH SDA) manakah yang memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan".

Pernyataan ini juga diperkuat lagi oleh Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016), yaitu :

> "Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DBH berpengaruh terhadap Belanja Modalpada kabupaten/kota di Wilayah Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat penerimaan diikuti dengan alokasi anggaran belanja modal. Tujuan utama dari dana bagi hasil yaitu untuk mengurangi ketimpangan fiskal

vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeridan PPh pasal 21".

Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh besar terhadap Belanja Modal, yang ang berarti apabila dana bagi hasil yang diterima oleh daerah tinggi, maka semakin tinggi pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut.

2.2.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Menurut Darwanto (2007:12), yaitu:

> **"**Menyatakan bahwa semakin banyak PAD yang diterima oleh daerah maka semakin banyak pula daerah dapat mengalokasikan dana untuk anggaran belanja modal daerah tersebut. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayah daerah itu sendiri."

Pernyataan ini juga sejalan dengan penntelitian yang dilakukan oleh Isti Permatasari dan Titik Mildawati, (2016), yaitu :

> "Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaru terhadap Belanja Modal (BM). Yang berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut."

Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli daerah Berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan begitu pengeluaran pemerintah lewat belanja modal melalui pembanguanan di berbagai sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah.

2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013: 96), Hipotesis yaitu :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan pada kajian teori yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal.
H2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Definisi Metode Penelitian menurut Sugiyono (2014:3), adalah :

> "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif karena data yang digunakan dalam populasi dan sampel berupa angka.

3.2. Operasional Variabel

Untuk variabel yang akan dikaji adalah Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. Adapun tabel operasionalisasi variabel yaitu :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Dana Bagi Hasil ($X_{1)}$	Definsi Dana Bagi Hasil (DBH) menurut Baldric Siregar (2015:144), adalah : "Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, dana bagi hasil merupakan pendapatan daerah yang berpotensi apabila dialokasikan untuk anggaran belanja modal".	Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2010:108), yaitu : a. Pajak b. Bagi hasil bukan pajak	Rasio
Pendapatan Asli Daerah ($X_{2)}$	Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Baldric Siregar (2015:31), adalah: "Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah."	Menurut Baldric Siregar (2015:132) indikator pendapatan asli daerah yaitu : a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rasio
Belanja Modal (Y)	Definisi Belanja Modal menurut Moh. Mahsun dkk (2013:99), adalah : "Belanja untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya".	Indikator Belanja Modal menurut Baldric Siregar, (2015:167), yaitu : a. Belanja Modal Tanah b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan d. Belanja Modal Irigasi, Jalan dan Jaringan e. Belanja Modal Fisik Lainnya	Rasio

3.3. Sumber Data dan teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitan ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Definisi data sekunder menurut Sugiyono (2014:137), adalah :

> "Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian".

Pengumpulan data sekunder merupakan data pendukung dari data primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan buku ilmiah, dokumen perusahaan, dan internet sebagai landasan teori guna membahas permasalahan yang sedang diteliti. Teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
   Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung pada instansi yang menjadi objek dalam penelitian. Adapun teknik yang digunakan pada penelitian lapangan menurut Sugiyono (2014:231-240) sebagai berikut :
   a. Dokumentasi
      Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.
   b. Wawancara
      pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
   Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan, toko buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis.
3. Riset Internet (*Online Research*)
   Pengumpulan data berasal dari situs-situs terkait untuk memperoleh tambahan literatur, jurnal dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4. Populasi, Sampel dan Waktu Penelitian

3.4.1. Populasi

Definisi populasi menurut (Sugiyono, 2014:215) adalah :

> "Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Brerdasarkan pengertian populasi diatas, maka penulis menentukan populasi dalam penelitian adalah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah selama 5 tahun pada 6 Kabupaten dan Kota yaitu 30 Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat 2011-2015.

3.4.2. Sampel

Definisi sampel menurut (Sugiyono, 2014:215) adalah :

> "Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid disekolah tertentu dan sebagainya."

Pada penelitian ini penentuan pengambilan sampel menggunakan teknik *nonprobability* sampling.

Definisi *nonprobability sampling* menurut Sugiyono (2014:125) adalah:

> "*Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel".

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh, teknik sampling jenuh.

Definisi sampling jenuh menurut Sugiyono (2014:126) adalah:

> "Sampling jenuh adalah teknik teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat genelaisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel"

Sampel dalam penelitian ini penulis mengambil semua anggota populasi yaitu 30 Laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015 untuk dijadikan sampel.

3.4.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis mengadakan penelitian pada Provinsi Jawa Barat. Dengan pengambilan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. PPH. Mustofa No.43,Cibeunying Kaler, Neglasari, Kota Bandug. Penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik tersebut.

3.5. Metode Pengumpulan Data

3.5.1. Uji Normalitas

Definisi uji normalitas Menurut Ghozali (2013:160), adalah :

> " Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal".

3.5.2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut V. Wiratna (2015:226) uji heterokedastisitas adalah :

> "Uji heterokedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas".

3.5.3. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013:105) uji multikolinieritas adalah :

> "Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol".

3.5.4. Uji Autokorelasi

Menurut Singgih Santoso (2012:241) mentakan bahwa :

"Uji autokorelasi yang dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat digunakan besaran *Durbin-Watson*".

3.6. Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.6.1. Rancangan Analisis

1. Analisis Deskriptif atau Kualitatif
   Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Perputaran Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

2. Analisis Verifikatif atau Kuantitatif
   Metode deskriptif verifikatif tersebut digunakan untuk menguji lebih dalam pengaruh Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Barat. Serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

   Adapun analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   1. **Analisis Regresi Linier Berganda**
      Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.
   2. **Analisis Korelasi *Pearson***
      Besarnya pengaruh masing-masing komponen variabel bebas terhadap variabel tidak bebas yaitu Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dapat diketahui dengan menggunakan korelasi *pearson*.
   3. **Analisis Korelasi Linear Berganda**
      Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antar variabel Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.
   4. **Analisis Koefisien Determinasi**
      Besarnya pengaruh Dana Bagi Hasil (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X2) terhadap Belanja Modal (Y) dapat diketahui dengan menggunakan analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya.

3.6.2. Pengujian Hipotesis

Menurut Andi Supangat (2007:293) yang dimaksud dengan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

"Salah satu cara dalam statistika untuk menguji "parameter" populasi berdasarkan statistik sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikansi tertentu. Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari masalah yang akan ditelaah. Sebagai wahana untuk menetapkan

kesimpulan sementara tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya."

Rancangan pada pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai X_1 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai X_2 terhadap variabel dependen (Y) yaitu Belanja Modal.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.1. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan nilai korelasi antara Dana Bagi Hasil terhadap Belanja modal yaitu sebesar 0.392 yang tergolong dalam kategori hubungan yang rendah. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,20 hingga 0.399 yang tergolong dalam kategori rendah dan hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaiakan Dana Bagi Hasil maka hal tersebut akan meningkatkan Belanja Modal. Besar presentase pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal yaitu sebesar 15.36%, yang mempunyai arti bahwa 15.36 % Belanja modal dipengaruhi oleh Dana Bagi Hasil, sedangkan sisanya sebesar 84.64 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Dana Perimbangan, Restribusi, Pajak Daerah. Dana Alokasi Umum, dan lain lain.

4.1.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan nilai korelasi antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja modal yaitu sebesar 0.573 yang tergolong dalam kategori hubungan yang sedang. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0.599 yang tergolong dalam kategori sedang dan hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaiakan Pendapatan Asli Daerah maka hal tersebut akan meningkatkan Belanja Modal. Besar presentase pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal yaitu sebesar 32.83%, yang mempunyai arti bahwa 32.83 % Belanja Modal dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya sebesar 67.17% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Dana Perimbangan, Restribusi, Pajak Daerah. Dana Alokasi Umum, dan lain-lain.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pada 6 kota / kabupaten Provinsi Jawa Barat maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015. Artinya, apabila Dana Bagi Hasil yang diterima cukup tinggi, maka semakin tinggi Belanja modal yang diterima. Tetapi pada permasalahan yang terjadi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015 yaitu Dana Bagi Hasil mengalami penurunan sedangkan pada Belanja Modal mengalami peningkatan.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kota/ kabupaten provinsi Jawa Barat periode Tahun 2011 – 2015, Artinya semakin Tinggi Pendapatan Asli Daerah maka belanja Modal yang akan di terima akan semakin tinggi. Tetapi pada permasalahan yang terjadi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015 yaitu Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sedangkan pada Belanja Modal mengalami penurunan.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Operasional

1. Permasalahan yang terjadi yaitu Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan seperti pada Kab. Bandung tahun 2015, Kab.Majalengka tahun 2015, Kota Cirebon tahun 2012 dan 2015 dan Kota Cimahi tahun 2015 tetapi pada Belanja Modal terjadi penurunan pada tahun 2012 dan 2015 pada 6 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015. Karena terjadi permasalahan maka penulis memberi saran kepada PEMDA/PEMKOT 26 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat harus bisa mensosialisasikan lagi mengenai dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah agar pendapatan daerah yang berasal dari pajak tersebut dapat lebih efektif dalam digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahtraan rakyat.
2. Permasalahan yang terjadi yaitu Dana Bagi Hasil menurun pada tahun 2013-2015 sedangkan Belanja Modal meningkat pada 6 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015. Karena terjadi permasalahan maka penulis memberi saran Untuk lebih mengoptimalkan lagi dana yang bersumber dari APBN, agar dana yang bersumber dari APBN tersebut dapat lebih efektif dan efisiensi penggunaannya, seperti mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting misalnya untuk dinas keluar kota atau negri. Seandainya tidak ada kebutuhan khusus atau mendesak sebaiknya tiak usah. Karena dana yang diberikan pemerintah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan yang lainnya.

5.2.2. Saran Akademik

1. Bagi Pengembangan Ilmu
   Dalam pengembangan ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya penelitian dapat menggunakan variabel yang sama tetapi unit analisis yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi Belanja Modal.
2. Bagi Peneliti Lain
   Bagi peneliti selanjutnya agar dapat untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama dan menggunakan factor-faktor lainnya yang kemungkinan mempengaruhi Belanja Modal selain Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah seperti Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Halim, 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Baldaric Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Berbasus Akrual)*. Yogyakarta : STIM YKPN.

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali pers.

Imam, Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

Jonathan Sarwono. 2012. *SPSS. Versi 14 Riset Pemasaran Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.

Mohammad, Mahsun. Firma, Sulistiyowati. Heribertur, Andrepurwa, Nugraha. 2013. *Akuntansi Sektor Publik.* BPFE Yogyakarta.

Nuarisa, S. A. 2013. *"Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal".* Accounting Analysis Journal, 2(1):89-95.

Pipin, Syarifin dan Dedeh, Jubaedah. 2005. *Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Sahya, Anggara. 2016. *Administrasi Keuangan Negara.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Santosa, Singgih. 2012. *Analisis SPSS pada Statistik Parametrik.* Jakarta: PT. Elex Media Komput Indo.

Subowo dan E. R. Wati. 2010. *"Hubungan antar PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Pemda Kudus".* Jurnal Dinamika Akuntansi, 2(2):73-82.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Penerbit Alfaberta, CV. Bandung.

Suharismi, Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

V Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Warsito, Kawedar. Abdul, Rohman. Sri, Handayani. 2011. *Akuntansi Sektor Publik (Pendekatan Penganggaran daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah).* Universitas Dipenogoro.

www.cnnindonesia.com